

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Kepulauan Maritim dengan mempunyai 17.508 pulau serta terbentang luas lautan sebesar 3.2 juta km². Indonesia memiliki hak atas kekayaan sumber daya alam perikanan serta memiliki kewenangan atas memelihara, mengatur, memberdayakan lingkungan kelautan karena Indonesia memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Dengan kawasan Indonesia yang sangat luas dan dikelilingi oleh panjang garis pantai mencapai 95.181 km membuat di berbagai daerah di Indonesia dikelilingi oleh pesisir lautan (Rochwulaningsih *et al.*, 2019). Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak potensi sumber daya dalam bidang kelautan dan perikanan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan Nasional merupakan suatu multidimensi yang melibatkan suatu kegiatan dalam tatanan sosial, masyarakat, kelembagaan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga mampu meminimalisir ketimpangan dan mengentaskan kemiskinan. Salah satu fungsi dalam pembangunan nasional yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional dituangkan dalam pembangunan daerah yang secara identik berfokus pada masyarakat di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan suatu unsur yang penting dalam melihat pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi daerah juga meningkat (Amin, 2019).

Pembangunan ekonomi memiliki dua faktor utama dalam mengidentifikasi potensi daerah, dimana yang pertama analisis sektor unggulan ekonomi yang

memiliki daya saing dalam suatu periode dan prospek sektor ekonomi dalam periode kedepan, yang kedua mengidentifikasi sektor ekonomi yang perlu untuk dikembangkan di masa yang akan datang meskipun pada beberapa masa periode belum memiliki daya saing yang tinggi (Rizani, 2019).

Pembangunan ekonomi daerah dilakukan dengan melakukan pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi diantaranya pemerintah daerah, masyarakat dan menciptakan pola kemitraan dengan pihak swasta terutama dalam membangun lapangan pekerjaan baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah (Khusaini, 2015). Pembangunan ekonomi dapat dilihat dari data statistik sebagai dasar penetapan strategi kebijakan dalam mencapai tujuan (Rizani, 2019).

Pembangunan ekonomi daerah diwujudkan dalam otonomi daerah yang tercantum Undang-Undang No.32/2004 "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Otonomi daerah merupakan suatu upaya bagi pemerintah daerah dalam menaikkan kesejahteraan daerah yang sejalan dengan kepentingan masyarakat dan mengurangi beban pemerintah pusat dengan mengatur dan mengelola potensi-potensi pada suatu daerah. Otonomi daerah menghasilkan suatu desentralisasi fiskal yang berguna dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kegiatan ekonomi daerah dengan melakukan suatu upaya dalam mengetahui karakteristik daerahnya sehingga dapat dimanfaatkan potensi ekonomi daerah sehingga mampu meminimalisir permasalahan yang terdapat disuatu daerah (Christia & Ispriyarso, 2019).

Permasalahan ekonomi menyangkut manusia terdapat dua pokok yaitu proses pemenuhan kebutuhan manusia itu sendiri dan barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat dari periode ke periode terus berkembang seiring dengan pertumbuhan penduduk yang tidak pernah berhenti. Secara ekonomi kebutuhan manusia bersumber dari alam yang dimanfaatkan dan dikelola oleh manusia dengan cara produksi maka mampu menghasilkan suatu barang atau jasa. Namun begitu, permasalahan yang terjadi karena kebutuhan dasar manusia yang sangat berlimpah membuat adanya keterbatasan sumber daya begitu juga kemampuan manusia dalam mengelola sumber daya tersebut (Sugiharsono & Wahyuni, 2019).

Permasalahan ekonomi yang terjadi di suatu daerah perlu untuk di pangkas dengan mencapai tujuan, sasaran kegiatan dan perencanaan dalam mendorong ekonomi daerah dengan cara memaksimalkan potensi sumber daya di dalam suatu sektor-sektor ekonomi daerah. Dengan melakukan strategi perencanaan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (Takalumang *et al.*, 2018).

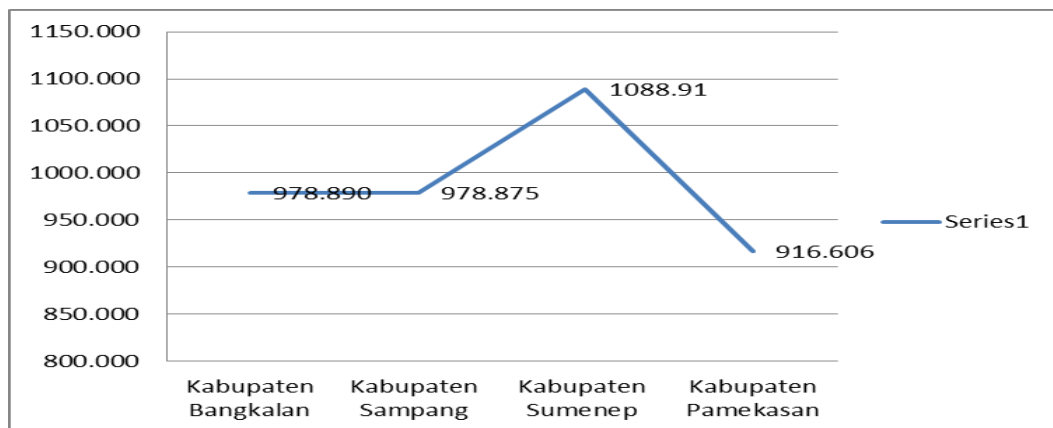
Kegagalan pembangunan daerah dapat terjadi yaitu salah satunya menyangkut aspek kebijakan yang diterapkan. Adapun salah satu alasan gagalnya perencanaan pembangunan daerah yaitu diantaranya : (1) perencanaan dan implementasi yang tidak efisien. (2) tidak tersedianya data yang memadai dan dapat dipercaya. (3) terdapat gangguan-gangguan ekonomi yang tak terduga baik dalam lingkup internal maupun eksternal. (4) lemahnya peran kelembagaan. (5) kurangnya komitmen dan kebijakan politik dari pusat dan pengambil kebijakan (Kuncoro, 2018).

Pembangunan daerah sebagai salah satu bentuk strategi dalam

pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah sendiri merupakan suatu unsur penting yang harus dimasukkan kedalam proses pembangunan daerah dalam mengoptimalkan potensi daerah sehingga suatu daerah dapat memiliki daya saing baik dalam kawasan global maupun nasional (Monica, 2020). Strategi pengembangan wilayah dapat dilakukan dengan melihat aspek kondisi, potensi serta masalah yang terjadi dalam proses perencanaan pembangunan (Setianto & Susilowati, 2014).

Pulau Madura adalah daerah yang termasuk ke dalam wilayah Provinsi Jawa Timur (Purnama Sari *et al.*, 2019). Pulau Madura membentuk suatu kawasan yang terdiri dari empat kabupaten diantaranya Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Pulau Madura berseberangan dengan Pulau Jawa yang berbatasan dengan Kota Surabaya yang dihubungkan oleh Jembatan Suramadu. Kabupaten yang terdapat di Pulau Madura memiliki pulau-pulau kecil yang diantaranya memiliki wilayah daratan dan kepulauan. Daratan memiliki karakteristik sebagai kegiatan sosial ekonomi, sedangkan kawasan kepulauan yang terdapat di sisi Madura menjadi suatu kawasan yang masih perlu terus untuk dikembangkan (Sudarti *et al.*, 2011).

Pulau Madura menjadi suatu wilayah yang memiliki luas sebesar 4.250 km². Pulau Madura merupakan suatu wilayah yang sangat menarik karena wilayahnya yang masih terdapat di Provinsi Jawa Timur namun memiliki ikon pembangunan yaitu Jembatan Suramadu yang memiliki panjang sebesar 5.438 m dalam menghubungkan Jawa Timur dan Pulau Madura (Penangsang *et al.*, 2019). Jembatan ini merupakan ikon penghubung kedua setelah pelabuhan Kamal Kabupaten Bangkalan.



Sumber : Badan Pusat Statistik 2020 (data diolah)

Gambar 1. 1 Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Madura Tahun 2019

Diagram 1.1 diatas memperlihatkan jumlah penduduk Kabupaten/Kota di Madura pada tahun 2019 yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada masing-masing kabupaten diantaranya Bangkalan, Sampang, Sumenep dan Pamekasan dalam angka pada tahun 2020. Gambar diatas menjelaskan bahwa jumlah penduduk di Madura didominasi oleh Kabupaten Sumenep dengan total 1.088.910 jiwa, dan kabupaten yang memiliki tingkat penduduk yang rendah yaitu ditunjukkan oleh Kabupaten Pamekasan dengan jumlah 916.606 jiwa. Sedangkan pada Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang memiliki jumlah penduduk yang relatif hampir sama jumlahnya yaitu pada Kabupaten Bangkalan sebanyak 978.890 jiwa sedangkan Kabupaten Sampang memiliki jumlah penduduk sebesar 978.875 jiwa.

Menelaah pembangunan yang menjadi ikon penghubung Pulau Jawa dan Pulau Madura yaitu Jembatan Suramadu yang diresmikan pada tahun 2009. Pada pulau jawa terdapat pintu utama Kota Surabaya dan di sisi Pulau Madura terdapat pintu utama Kabupaten Bangkalan. Dimana Kabupaten Bangkalan ini termasuk kedalam wilayah pengembangan Kota Surabaya. Namun begitu masih belum diketahui apakah tujuan pemerataan antara Kota Surabaya dan Madura

Kabupaten Bangkalan melalui pembangunan Jembatan Suramadu benar-benar terjadi atau bahkan pembangunan masih terfokus di wilayah Kota Surabaya yang menjadi pusat pertumbuhan salah satunya sebagai kawasan industri dan perdagangan yang besar.

Tabel 1. 1 Rata-Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Pulau Madura Tahun 2015-2019

Kabupaten	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata
Kabupaten Bangkalan	-2.66%	0.66%	3.53%	4.22%	1.03%	1.36%
Kabupaten Sampang	2.11%	6.17%	4.69%	4.56%	1.42%	3.79%
Kabupaten Sumenep	1.27%	2.58%	2.86%	3.63%	0.14%	2.10%
Kabupaten Pamekasan	5.32%	5.35%	5.04%	5.46%	4.92%	5.22%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan 2020 (data diolah)

Tabel 1.1 diatas bersumber dari BPS, dimana data tersebut menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Pulau Madura tahun 2015-2019 dalam Tabel 1.1 secara rata-rata yang paling tinggi adalah Kabupaten Pamekasan dengan jumlah 5.22% dan yang paling rendah dengan jumlah 1.36% yaitu pada Kabupaten Bangkalan.

Pulau Madura merupakan suatu Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Madura (KKJSM) yang termuat dalam rencana Badan Pengembangan Wilayah (BPWS) Suramadu-Madura. Dalam Peraturan Presiden No.27/2008 tentang BPWS kawasan yang menjadi perencanaan merupakan kawasan yang memiliki keunggulan di Madura sehingga melalui pemerataan pembangunan wilayah memicu peningkatan ekonomi dan pembangunan di Madura. Dalam Rencana Kerja BPWS pada tahun 2019 merujuk pada RPJMN dimana prioritas pengembangan wilayah Suramadu salah satunya yaitu dengan meningkatkan produktifitas rakyat dan meningkatkan daya saing wilayah, meningkatkan potensi

ekonomi wilayah, mempercepat pembangunan akses jalan, pengembangan daerah perkotaan dan perdesaan, dan pengembangan kawasan tertinggal.

Rencana Strategis BPWS yang dimuat dalam tahun 2020-2024 menyatakan bahwa tantangan yang terjadi di KKJSM yaitu secara garis besar terdapat di beberapa Kabupaten di Madura. Adapun tantangan yang menjadi fokus BPWS yaitu adanya ketimpangan pengembangan wilayah Madura dengan daerah lain di Provinsi Jawa Timur, kualitas dan ketersediaan infrastruktur ekonomi, penciptaan iklim investasi dan usaha yang menarik, kebutuhan SDM dalam mendukung industrialisasi Madura, dan perlunya para pelaku ekonomi dalam percepatan pembangunan ekonomi. Peran BPWS sangat diperlukan dalam membangun sinergi perencanaan pengembangan wilayah. Namun begitu, BPWS belum memiliki instrumen perencanaan dengan landasan hukum yang kuat sehingga bisa menjadi acuan bagi sektor yang lain. Berdasarkan Peraturan Presiden No.27/2008, BPWS memiliki kewenangan dalam menerima urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, namun dalam prakteknya Pemerintah Pusat dan Daerah belum ada yang memberikan wewenang ke BPWS.

Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) yang menjadi suatu badan yang memiliki fungsi dalam meningkatkan pembangunan yang terdapat di sisi Jembatan Suramadu. BPWS memiliki tujuan diantaranya meningkatkan akuntabilitas dan kompetitif internal, meningkatkan layanan infrastruktur, meningkatkan kapasitas SDM yang produktif, berkualitas dan berdaya saing, dan meningkatkan investasi Kawasan Madura. Namun demikian, BPWS menjadi salah satu dari 10 lembaga non-struktural yang resmi dibubarkan oleh Bapak Presiden ke-8 Indonesia pada saat ini yaitu Jokowi dimana pada Bulan November tahun 2020 lewat Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2020.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Timur pada pasal 87 menyatakan bahwa Kabupaten Bangkalan merupakan suatu kawasan agropolitan dengan karakteristik kabupaten tertinggal yang memiliki pengaruh terhadap pemerataan dan pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten/Kota lain dan Provinsi.

Rencana Strategis Badan Perencana Pembangunan Daerah (Renstra Bappeda) Kabupaten Bangkalan 2018-2023 menyatakan bahwa masih terdapat permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bangkalan diantaranya (a) kesadaran aparatur dalam pelaksanaan hasil perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan masih rendah. (b) belum maksimalnya ketersediaan suatu sarana data base dalam menyediakan informasi kinerja perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban program kerja Pemda. (c) pemanfaatan peluang otonomi daerah dengan merujuk pada perundang-undangan dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah masih belum optimal. Artinya bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan masih bergantung kepada Pemerintah Pusat dalam segi Dana Perimbangan dan Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat. (d) kurang optimalnya dalam pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan tata ruang.

Pulau Madura sebagai kawasan yang berhimpitan dengan Pulau Jawa dengan pintu utama Pulau Madura yaitu Kabupaten Bangkalan memiliki keunggulan sebagai kawasan pesisir yang mendorong sektor ekonomi daerah khususnya dalam sektor pertanian. Potensi pertanian dapat dimanfaatkan dengan cara pengembangan kawasan dalam memanfaatkan *resource* dan mengurangi permasalahan sehingga solusi dapat dibuat dalam pengelolaan dan penggunaan ruang. Jika pengembangan kawasan pesisir dilakukan maka akan

meningkatkan perkembangan ekonomi wilayah.

Kabupaten Bangkalan sendiri merupakan suatu wilayah yang menarik untuk diteliti dengan mempertimbangkan aspek atau variabel dalam sektor-sektor ekonomi sebagai pusat sektor potensial dengan menggunakan kriteria sektor unggulan serta daya saing wilayah. Dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan, prioritas pembangunan daerah masih kurang terstruktur secara lebih luas dengan fokus peningkatan potensi daerah dalam segi sektor ekonomi pertanian, industri dan pariwisata. Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bangkalan yang tertuang di dalam RKPD Kabupaten bangkalan yaitu diantaranya laju pertumbuhan ekonomi yang lambat, masih rendahnya angka pendidikan dan kesehatan, adanya kesenjangan daerah, dan dalam pelaksanaan pembangunan daerah Pemerintah Daerah masih belum mandiri.

Kabupaten Bangkalan sebagai kawasan yang berhimpitan dengan Selat Madura memiliki wilayah dengan karakteristik sebagai wilayah pesisir diantaranya Kecamatan Sepulu, Bangkalan, Socah, Kamal, Modung, Kwanyar, Arosbaya, Klampis, Tanjung Bumi, Labang dan Burneh. Penelitian ini dilakukan dengan memiliki fokus kedalam wilayah pesisir yang terdapat di Kecamatan Labang. Kabupaten Bangkalan memiliki pusat pemerintahan yaitu di Kecamatan Bangkalan.

Informasi yang didapat dari Renstra Bappeda Kabupaten Bangkalan 2018-2023 pusat kegiatan ekonomi pada saat ini masih terfokus pada wilayah Kecamatan Bangkalan yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Bangkalan. Hal tersebut tertuang dalam tata ruang Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) dimana Kecamatan Bangkalan merupakan SSWP 1 dengan pusat

kegiatan perdagangan tingkat regional dan lokal, industri dan perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan, jasa transportasi, dan jasa pemerintahan umum lingkup regional. Dengan pusat kegiatan yang berkonsentrasi di Kecamatan Bangkalan membuat perkembangan wilayah kurang efektif dan pertumbuhan ekonomi wilayah kurang tersebar ke seluruh wilayah di Kabupaten Bangkalan. Sedangkan, Kecamatan Labang merupakan SSWP 2 dengan Pusat Pengembangan Perkotaan Labang yang memiliki fungsi utama sebagai Industri dan Pergudangan, Transportasi Laut dan Darat, Pertanian dan Perikanan.

Kecamatan Labang adalah suatu kawasan pesisir yang terhubung dengan Jembatan Suramadu di Kabupaten Bangkalan. Kecamatan Labang ini menjadi salah satu daerah kawasan pesisir karena daerah ini terletak di antara lautan dan daratan. Kecamatan Labang memiliki karakteristik sebagai daerah pemukiman dan di sisi kaki jembatan Suramadu terdapat beberapa usaha toko kelontong hingga pedagang kaki lima. Kawasan pesisir Suramadu Kecamatan Labang Kabupaten Madura memiliki banyak potensi daerah diantaranya sumber daya manusia, sumber daya alam, wisata hingga lahan yang luas. Kawasan pesisir sendiri terdapat di 3 desa di Kecamatan Labang diantaranya Desa Sukolilo Timur, Desa Sukolilo Barat dan Desa Kesek. Sebagai kawasan pesisir, Kecamatan Labang memiliki potensi yang tidak kalah menarik dari kawasan pesisir kaki Suramadu sisi Surabaya. Hal tersebut dapat dilihat dari data perbandingan antara kondisi kawasan pesisir kaki Suramadu sisi Surabaya dan sisi Madura yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Pintu Utama KKJS Surabaya-Madura

Tahun	Jumlah Penduduk Kecamatan Labang	Kepadatan Penduduk Kecamatan Labang (Jiwa/Km ²)	Jumlah Penduduk Kecamatan Kenjeran	Kepadatan Penduduk Kecamatan Kenjeran (Jiwa/Km ²)
2015	34.296	0.973	153.991	19.947
2016	34.445	0.978	161.367	20.902
2017	34.579	0.982	166.627	21.584
2018	34.707	0.985	172.174	22.302
2019	39.779	1.129	179.198	23.212
Rata2	35.561	1.009	166.671	21.589

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

Tabel 1.2 diatas yang bersumber dari BPS dimana data tersebut menjelaskan bahwa terdapat beberapa aspek dalam wilayah yang dapat mendorong suatu kegiatan ekonomi wilayah di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJS) wilayah Surabaya dan Madura. Salah satunya ada jumlah penduduk dan kepadatan penduduk. Jumlah penduduk di Kecamatan Kenjeran menunjukan angka yang lebih besar daripada Kecamatan Labang dimana rata-rata jumlah penduduk Kecamatan Labang dalam 5 tahun mencapai 35.561 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 1.009 jiwa/km². Sedangkan pada Kecamatan Kenjeran rata-rata jumlah penduduk selama 5 tahun menunjukan angka yang lebih besar yaitu mencapai 166.671 jiwa dengan 21.589 jiwa/km².

Tabel 1. 3 Luas Wilayah Daerah Kecamatan Pintu Utama KKJSS dan KKJSM

Kecamatan	Luas Wilayah Kecamatan (KM)
Kecamatan Labang	35.23
Kecamatan Kenjeran	7.72

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

Tabel 1.3 diatas bersumber dari BPS dimana data tersebut menjelaskan bahwa luas wilayah pada KKJSS dan KKJSM pada Kecamatan Kenjeran dan Kecamatan Labang. Dapat dilihat di dalam tabel diatas bahwa luas wilayah Kecamatan Labang lebih luas yaitu sebesar 35.23 km, sedangkan Kecamatan

Kenjeran memiliki luas wilayah yang lebih kecil yaitu 7.72 km. Dengan jumlah penduduk Kecamatan Kenjeran mencapai ratusan jiwa yang setiap tahunnya mengalami peningkatan hingga mencapai rata-rata pada 5 tahun terakhir yaitu sebesar 166.671 jiwa dengan luas wilayah sebesar 7.72 km² membuat Kecamatan Kenjeran memiliki karakteristik kepadatan penduduk yang tinggi daripada Kecamatan Labang yang hanya memiliki rata-rata jumlah penduduk selama 5 tahun sebesar 35.561 jiwa dengan luas wilayah yang lebih besar yaitu 35.23 km².

Tabel 1. 4 Potensi Kawasan Pesisir Kecamatan KKJS Tahun 2015-2018

Tahun	Produksi Perikanan Laut Kecamatan Labang (Ton)	Produksi Perikanan Laut Kecamatan Kenjeran (Ton)
2015	1.184,2	128.2
2016	1.208,3	128.2
2017	1.208,3	122
2018	1.164,3	121.9
2019	1.173,3	190.7
Jumlah	5.938,40	691

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

Merujuk pada Renstra Bappeda Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Labang merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama sebagai sektor Perikanan hal tersebut dapat dibuktikan pada Tabel 1.4 diatas yang menunjukkan bahwa produksi hasil tangkap laut Kecamatan Labang sangat besar daripada Kecamatan Kenjeran. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil ikan tangkap di wilayah pesisir kaki Suramadu Kecamatan Labang mempunyai potensi yang cukup besar dalam produksi perikanan tangkap. Selain itu wilayah pesisir di Kecamatan Labang memiliki potensi wisata pantai pesisir diantaranya di Desa Sukolilo Timur terdapat wisata goa patapa, Di Desa Sukolilo Barat terdapat wisata pantai sukbar dan di Desa Kesek terdapat wisata pantai rindu.

Kecamatan Labang sangat menarik untuk diteliti seperti yang sudah di jabarkan pada Tabel diatas Kecamatan Labang memiliki sisi potensi yang baik untuk mampu dikembangkan dan dikaji agar mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap daerah sekitarnya maupun daerah lain yang terdapat di Kabupaten Bangkalan maupun di sisi yang luas yaitu Pulau Madura. Potensi yang ada dengan diiringi pengurangan tantangan dan permasalahan yang terdapat di Kecamatan Labang akan mampu memberikan dampak yang sangat baik dalam jangka yang panjang. Selain itu, perencanaan pengembangan kawasan yang baik dan berkesinambungan akan mampu menjadi acuan dalam sektor-sektor ekonomi lainnya di suatu daerah.

Informasi yang diperoleh peneliti bahwasanya peneliti menemukan suatu mendapatkan suatu fakta kondisi dimana kawasan pesisir kaki Suramadu Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan mengalami permasalahan sosial yaitu terjadinya pencemaran dalam sumber daya kelautan karena adanya sampah akibat aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Tidak adanya tempat pembuangan akhir (TPA) di Kecamatan Labang terutama di wilayah pesisir sehingga masyarakat yang tidak bisa mengelola sampah akan membuang semua sampah ke sembarang tempat hingga di laut. Selain itu, Kecamatan Labang memiliki akses jalan yang kurang memadai, jalan yang akan menuju ataupun keluar dari kawasan ini sangat kurang memadai dimana jalanya yang masih rusak sehingga perjalanan menjadi sangat kurang efisien dan nyaman.

Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mengelola sumber daya perikanan membuat masyarakat khususnya para nelayan masih menggunakan alat tradisional yaitu jaring dalam menangkap ikan hal tersebut membuat hasil tangkap yang kurang maksimal. Selain itu, di kawasan pesisir tidak ada bentuk

usaha kecil dan menengah dan tidak adanya kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang dapat menarik masyarakat luar daerah sehingga kawasan pesisir di KKJS Kecamatan Labang tidak sepadat kegiatan baik sosial, ekonomi dan budaya di KKJS Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.

Wilayah pesisir di Kecamatan Labang dapat dimanfaatkan dengan mengenali kondisi strategis yang mampu dikembangkan sehingga dapat menjadi ikon pembangunan wilayah. Terlepas dari sumber daya laut yang dapat dihasilkan sebagai mata pencaharian masyarakat sekitar, wilayah pesisir dikembangkan dengan menempatkan lapangan usaha perdagangan.

Kawasan pintu utama KKJS ini seharusnya berpotensi besar terhadap pembangunan daerah, namun kurang dikembangkan secara optimal. Seharusnya pembangunan KKJS menjadi objek penarik investor untuk mengembangkan potensi kawasan KKJSM sehingga menjadi pendorong kegiatan ekonomi-sosial masyarakat sekitar. Dengan potensi yang terdapat di Kecamatan Labang seharusnya menjadi pendorong dalam pembangunan wilayah, sehingga kawasan ini menjadi suatu aspek yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun pusat.

Permasalahan penelitian yang dilakukan ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Faoziyah, 2016) dimana hasil penelitian menjelaskan bahwa Pembangunan Jembatan Suramadu yang sudah dibangun tidak merubah kondisi ekonomi-sosial masyarakat secara signifikan. Meskipun kawasan pesisir Kecamatan Labang memiliki potensi yang besar namun kawasan pesisir menunjukkan kurang berkembang daripada kawasan pesisir lainya diantaranya kawasan pesisir kaki Suramadu Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran yang terkenal dengan kawasan yang memiliki karakteristik tingkat pendidikan yang

tinggi, tingkat penyerapan tenaga kerja tinggi, pengembangan pariwisata dan perdagangan yang besar. Terdapat ketimpangan pembangunan kawasan yang terjadi di antara kawasan pesisir kaki Suramadu sisi Kota Surabaya dan kawasan pesisir kaki Suramadu sisi Pulau Madura.

Berangkat dari hal permasalahan dan potensi yang sudah dijabarkan oleh peneliti diatas, maka untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi wilayah pesisir Kecamatan Labang maka peneliti perlu mengidentifikasi Kecamatan Labang yang terdapat di Kabupaten Bangkalan yang dinilai perlu dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Hingga saat ini masih belum ada kajian akademis mengenai potensi serta mampu mengembangkan kawasan pesisir Kecamatan Labang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Sehingga dengan dilakukanya analisis dalam perkembangan wilayah maka secara tidak langsung akan menguntungkan daerah Kecamatan Labang khususnya pintu utama gerbang Kabupaten Bangkalan. Dengan dilakukan penelitian di Kecamatan Labang sesuai dengan ketersediaan sarana prasarannya serta potensi daerah yang nantinya dapat dikembangkan sehingga mampu mengoptimalkan kegiatan ekonomi secara efektif dan efisien, selain itu juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan wilayah yang bersangkutan dan menyebar ke wilayah lain.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dipaparkan oleh peneliti diatas, fokus yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian yaitu :

1. Seberapa besar potensi Kawasan Pesisir Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan Pulau Madura yang menjadi daya saing dan daya tarik kawasan?
2. Bagaimana strategi pengembangan kawasan pesisir Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan Pulau Madura?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dijabarkan oleh peneliti diatas, fokus tujuan penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi seberapa besar potensi kawasan pesisir Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan Pulau Madura yang menjadi daya saing dan daya tarik kawasan.
2. Mengidentifikasi strategi pengembangan kawasan pesisir Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan Pulau Madura.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian akan menghasilkan manfaat secara teoritis dan praktis diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan dilakukanya riset ini dapat menjadi masukan ilmu pengetahuan mengenai konsep, teori serta kondisi empiris berkaitan dengan teori pengembangan wilayah dan perencanaan pembangunan daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dibuat sebagai referensi serta bahan rujukan untuk pihak-pihak para pelaku ekonomi khususnya Pemerintah dalam mengkaji pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Bagi pihak swasta dengan meningkatkan investasi dan penanaman modal dalam meningkatkan sektor pertumbuhan ekonomi, bagi pihak akademisi yang dapat mengkaji penelitian secara lebih mendalam mengenai pembangunan ekonomi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan bagi masyarakat yang mampu mendorong kegiatan ekonomi dengan cara ikut dalam proses pemenuhan kebutuhan dari segi produksi barang dan jasa.